



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jl. A. Yani No. 90 Telp/Fax 0719 – 23831
TANJUNGPANDAN

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P)
TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG
TANJUNGPANDAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini merupakan suatu dokumen rencana pelaksanaan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk tahun 2025 sehingga dapat terarah dan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Renja-P) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung ini dapat bermanfaat sebagai peningkatan kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, Agustus 2025

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Belitung**



Ir. Destika Efenly, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19651208 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	
 TRIWULAN II TAHUN 2025.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
 DAERAH.....	18
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

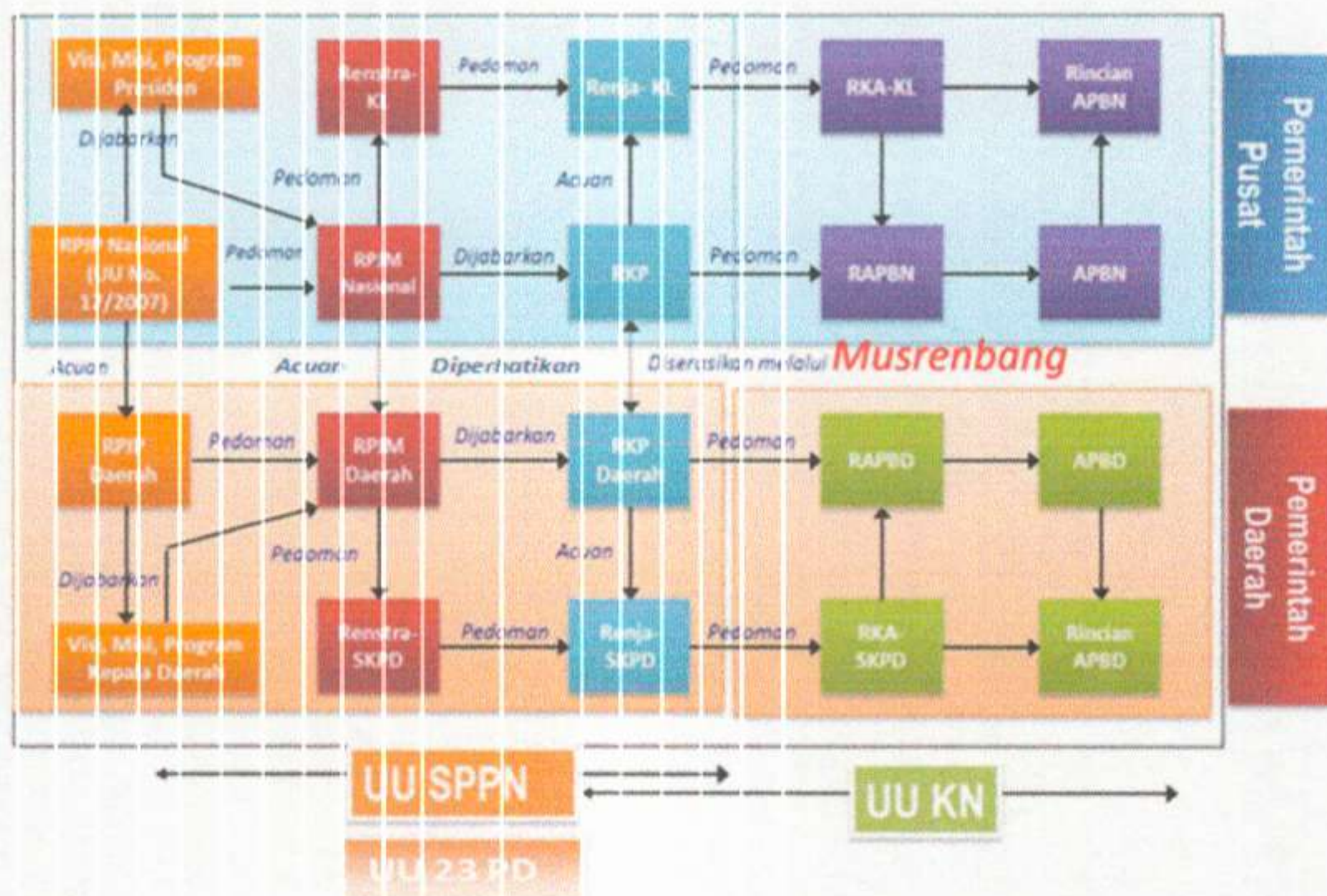
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan rancangan akhir,
6. Penetapan.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran

keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat daerah menerima surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
2. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD.
3. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
4. Verifikasi oleh Bappeda yang bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
5. Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA.
7. Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah Kabupaten Belitung. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita

- Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54)
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Pembibitan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
 18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 85);
 19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8).
 20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan perubahan untuk periode sisa tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja perubahan ini adalah untuk:

1. Menselaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD tahun 2025.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam upaya melaksanakan Pelayanan Publik.
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025 menggambarkan sejumlah target kinerja kegiatan/program yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DKPP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengacu pada pencapaian indikator yang tertuang dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026. Pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung tahun 2025 terdapat 10 Program, 24 Kegiatan dan 58 sub-Kegiatan dengan indikator sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Th. 2021 yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang tertuang di dalam Renstra-PD tahun ke-2. Pencapaian kinerja pelayanan DKPP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan DKPP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengacu pada pencapaian indikator yang tertuang dalam Renstra-PD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026. Pada Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung tahun 2025 terdapat 10 Program, 25 Kegiatan dan 58 sub-Kegiatan dengan indikator sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Th. 2021 yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang tertuang di dalam Renstra-PD tahun ke-2. Pencapaian kinerja pelayanan DKPP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Reraja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
Reraja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Pangean dan Pertanian Kabupaten Belitung
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Kabupaten Belitung yang tercantum pada sistem RAKPD :

1. Guna Poda Pangean Belitung (PPO)
2. Peningkatan (%) Ketersediaan Energi dan Irigasi per Aqas
3. Produk Pertanian

No.	Siswa	Kode	Program/Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RAKPD Tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RAKPD yang dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RAKPD Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran RAKPD tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RAKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RAKPD tahun 2024	100% Pemenuhan Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dinas Kelautan Pangean dan Pertanian Kabupaten Belitung														
Program Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketersediaan Pangan Masyarakat														
1.1	2	09	03	2.01	97,40 %	312,844	97,40 %	333,389	56,43 %	132,44	8,49 %	133,37	0,00 %	22,48 %
Tugas: Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketersediaan Pangan Masyarakat														
Kegiatan: Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketersediaan Pangan Masyarakat														
Indikator: Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketersediaan Pangan Masyarakat														
1.1.1	2	09	03	2.01	32,456	11,403	32,456	11,403	32,456	11,403	32,456	11,403	32,456	11,403
1.1.2	2	09	03	2.01	32,456	11,403	32,456	11,403	32,456	11,403	32,456	11,403	32,456	11,403
1.2	1	09	03	2.02	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403
1.2.1	2	09	03	2.02	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403
1.2.2	2	09	03	2.02	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403	444,42	11,403
1.3	2	09	03	2.04	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403
1.3.1	2	09	03	2.04	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403
1.3.2	2	09	03	2.04	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403	11,403
Program Peningkatan Ketersediaan Pangan														
2	2	09	04	2.01	209,432	2	209,432	2	209,432	2	209,432	2	209,432	2
2.1	2	09	04	2.01	209,432	2	209,432	2	209,432	2	209,432	2	209,432	2
2.1.1	2	09	04	2.01	209,432	2	209,432	2	209,432	2	209,432	2	209,432	2

No.	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target RPMD pada Tahun 2026 (akhir periode RPMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPMD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD 6d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RPMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD 6d tahun 2024	PD Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.2		1 09 04 2.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
2.2.1		1 09 04 2.01 0003	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD 6d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RPMD)																			
3	2	09 05	Program Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	Program Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
3.1	3	09 05 2.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
3.1.1		1 09 05 2.01 0007	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD 6d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RPMD)																			
1.1	3	27 01 2.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
1.1.1		1 27 01 2.01 0001	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
1.1.2		1 27 01 2.01 0007	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
1.2	3	27 01 2.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
1.2.1		1 27 01 2.02 0001	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	
1.2.2		1 27 01 2.02 0005	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	Sosialisasi dan Pengawasan Kualitas Produk	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	

No.	Sumber	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Realisasi Kinerja Pada Trivium												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2024	PD Penanggung Jawab								
					I				II				III							IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
4.1.1.		3 27 04 2.01 0002	Sekolah Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	12 laporan	435.64	0 laporan	0.00	4 laporan	98.18	1 laporan	37.38	1 laporan	13.60				2 laporan	80.96	2 laporan	51.94	2 laporan	50.98	16.67	11.70	%	%
4.1.		3 27 04 2.01	Kegiatan Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Kelompok Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	3000 pembelajaran	331.74	3000 pembelajaran	85.57	3000 pembelajaran	110.48	3000 pembelajaran	1.00	3000 pembelajaran	2.50				2-111 pembelajaran	7.10	2-111 pembelajaran	2.24	2-111 pembelajaran	2.10	100	100	%	%
4.1.1.		3 27 04 2.01 0001	Sekolah Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	12 laporan	331.74	12 laporan	85.57	12 laporan	110.48	12 laporan	3.50	12 laporan	3.20				6 laporan	9.10	6 laporan	8.24	6 laporan	9.10	50.00	2.74	%	%
4.2.		3 27 04 2.01	Kegiatan Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Kelompok Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	3000 pembelajaran	142.33	3000 pembelajaran	33.10	3000 pembelajaran	63.00	3000 pembelajaran	0.00	3000 pembelajaran	10.00	10.00			18 pembelajaran	19.93	18 pembelajaran	3.0	18 pembelajaran	10.00	33.33	19.93	%	%
4.2.1.		3 27 04 2.01 0006	Sekolah Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%
5		3 27 05 2.01	Kegiatan Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%
5.1		3 27 05 2.01	Kegiatan Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%
5.1.1.		3 27 05 2.01 0001	Sekolah Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%
6		3 27 06 2.01	Kegiatan Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%
6.1		3 27 06 2.01	Kegiatan Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%
6.1.1.		3 27 06 2.01 0001	Sekolah Pembelajaran Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa (PPLN) dan Literasi Digital (LD)	Hasil belajar dan kemajuan yang menunjukkan peningkatan literasi yang dapat diukur dari jumlah skor tes literasi digital dan literasi numerasi	30 pembelajaran	142.33	30 pembelajaran	33.10	30 pembelajaran	63.00	30 pembelajaran	0.00	30 pembelajaran	10.00	10.00			2 pembelajaran	2.00	2 pembelajaran	0.00	2 pembelajaran	1.00	100	100	%	%

No.	Baris	Kode	Program/Topik	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Target Kinerja dan Anggaran RASPD Tahun 2025 yang direvisi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s.d akhir tahun pelaksanaan RPMD	Tingkat Capaian dan Kinerja RPMD s.d akhir tahun Anggaran RPMD s.d tahun 2024	PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					I				II				III								IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K	R	Pj	Pj	K	R	Pj	Pj	K	R	Pj	Pj						K	R	Pj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	7.1	3 27 07 4.01	Program Penyediaan Perlengkapan	Penyediaan bahan kelengkapan kelengkapan dan bahan kelengkapan / bahan kelengkapan (RPMD)	K	R	Pj	K	R	Pj	K	R	Pj	K	R	Pj	K	R	Pj																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45	1.700.000	292.250	292.250	45</

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD s.d akhir tahun pelaksanaan RKPD																				
Tingkat Capaian dan Kinerja RPMD s.d akhir tahun Anggaran RPMD s.d tahun 2024																				
PD Penanggung Jawab																				

Tenggungsi, 14 Mei 2024
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bantul
 B. DEDY L. PRASETYO, MM
 Pejabat Utama Madya
 NIP. 196112081992031000

Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II didapat dihasil pencapaian kinerja masing-masing program, yaitu:

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat realisasi kinerja program masih belum bisa dilihat dikarenakan Persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang merupakan indikator programnya baru akan dihitung pada akhir tahun.
- Program Penanganan Kerawanan Pangan juga belum bisa dilihat hasil kinerjanya karena indikator kinerja dari program ini, Persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan, baru pada tahap pengumpulan data dan akan dihitung di akhir tahun anggaran.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan yang indikator kinerjanya Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan realisasi 98% (sembilan puluh delapan persen), dari pengujian sampel yang sudah dilakukan sebanyak sembilan kali sampai dengan Triwulan II dengan total sampel sebanyak 52 sampel pangan segar didapat hasil 51 sampel aman untuk dikonsumsi.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh realisasi kinerja Program sebesar 40%, yang merupakan rata-rata dari 4 indikator kinerja program;
“Persentase dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan” dengan capaian kinerja sebesar 60% (lima puluh persen), “Indeks Professional ASN Perangkat Daerah” dengan realisasi 0% (nol persen), karena belum dilakukan penilaian sampai dengan Triwulan II. “Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah” dengan realisasi 50% (lima puluh persen), dan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan capaian kinerja 50% (lima puluh persen).
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian realisasi kinerjanya masih 5,87% (lima koma delapan tujuh persen) dari target sebesar 14,70% (empat belas koma tujuh nol

persen). Indikator program ini yaitu Persentase (%) kebutuhan sarana pertanian yang disediakan hanya sebagian yang terpenuhi dari target sebanyak 6 jenis (saprodi pangan 2 jenis, saprodi peternakan 1 jenis).

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, capaian kinerjanya masih 33,82% (tiga puluh tiga koma delapan dua persen) karena indikator kinerjanya Persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan 11,72% (sebelas koma tujuh dua persen) dan Persentase (%) prasarana pertanian dalam kondisi baik tercapai 84,76% (delapan puluh empat koma tujuh enam persen). Persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan mencapai 11,72% dihitung dari 119 hektar sawah yang sudah ditanami dari total sawah yang ada seluas 1.015,39 hektar. Untuk indikator persentase (%) prasarana dalam kondisi baik terhitung sebanyak 96 unit dari total 136 unit sampai dengan Triwulan II.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sudah mencapai target kinerja 100% dengan indikator Persentase (%) penanganan penemuan kasus penyakit hewan menular, dibuktikan dengan sudah ditanganinya semua kasus penyakit hewan menular yang ditemukan.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sudah sudah mencapai 100% karena dari 304 hektar lahan pertanian yang dikelola, semuanya sudah mendapat perlakuan pengendalian OPT.
- Program Perizinan Usaha Pertanian terealisasi 100% (serratus persen) dimana 17 usaha pertanian besar sudah memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Program Penyuluh Pertanian capaian realisasi programnya sudah mencapai 0% (nol persen) dimana belum ada peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani sampai dengan Triwulan II.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja dan keuangan DKPP sampai dengan Triwulan II masih dikategorikan sangat rendah, dimana rata-rata capaian kinerja sub-kegiatan sebesar 41,78% (empat puluh satu koma tujuh delapan persen) dan rata-rata realisasi fisik keuangan hanya sebesar 18,90% (delapan belas koma Sembilan nol persen).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana perubahan program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan pendekatan perencanaan baik partisipatif, *topdown* dan *bottom-up*. Rencana program dan kegiatan tahun 2025 memuat uraian seluruh urusan wajib non pelayanan dasar dan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada Review Perubahan Ketiga Renstra PD Tahun 2024-2026, setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan, baik yang berasal dari dana APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana APBD Kabupaten Belitung. Rencana program dan kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan perubahan kebutuhan dana pada tahun 2025.

Adapun program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari 10 Program, 25 Kegiatan, dan 58 Sub Kegiatan, dengan nomenklatur sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis;
 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota;
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan;

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan;
 - Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.
 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Alat Besar;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
 - c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.
 - d. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan;

- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya;
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan;
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
- a. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan;
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan.
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
9. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian.
10. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (RKPD-P) Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran
					Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja P 2025	Lokasi	Sumber Dana		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	
2			Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar										
2	09		Bidang Urusan : Pangan										
2	09	03	1 Program : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase (%) konsumsi pangan terdistribusi Angka Kecukupan Gizi	97,50 %	97,5 %	200.002.029	183.232.529	313.766.297				
2	09	03	1. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya	Keluaran : Dokumen Ketahanan Pangan	3 dokumen	2 dokumen	30.509.597	24.946.997	40.633.445				
			sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Hasil : Ketersediaan Pangan Padat (kkal/kap/hr)	1.200 kkal/kap/hr	1.200 kkal/kap/hr							
2	09	03	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	8.827.000	8.001.000	24.502.000	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat	
2	09	03	2. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBMM)	Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBMM)	1 dokumen	1 dokumen	21.682.597	16.945.997	16.041.445	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat	
2	09	03	2. Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Cadangan Pangan Daerah	33.576 ton	18.386 kg	126.963.432	125.765.032	248.765.032				
				Hasil : Persentase (%) Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah	51,12 %	100 %							
2	09	03	1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 ton	14000 kg	59.998.400	58.800.000	198.800.000	Tanjunggondan	APBD-P	Masyarakat	
2	09	03	2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	24 ton	30.692 kg	48.000.000	48.000.000	34.000.000	Tanjunggondan	APBD-P	Masyarakat	
2	09	03	3. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,9 ton	12000 kg	18.965.032	18.965.032	15.965.032	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat	
2	09	03	3. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Keluaran : Konsumsi pangan perkapita/tahun	766.500 kkal/kap/hr	766.500 kkal/kap/hr	42.529.000	32.520.500	23.868.500				
				Hasil : Tercapainya tingkat kecukupan energi perkapita/hr	2.100 kkal/kap/hr	2100 kkal/kap/hr							
2	09	03	1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	1 dokumen	5.979.000	970.500	800.500	Tgandan	APBD-P	Masyarakat	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Kelompok Sasaran		
					Sebelum (4)	Sesudah (5)	Renja 2025 (6)	APBD 2025 (7)	Renja-P 2025 (8)	Lokasi (9)		Sumber Dana (10)	
(1)			(2)		(3)			(7)		(8)	(9)	(10)	(12)
2.09	03	2.04.0002	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kewirausahaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Keluaran : Jumlah Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Kewirausahaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	36.550.000	31.550.000	23.068.000	Kab Belitung	APBD-P	KWT	
2.09	04	2.01	3. Program : Program Peningkatan Kewirausahaan Pangan	Persentase penurunan desa rentan rawan pangan	2 desa	2,04 %	62.879.275	53.915.475	22.263.200				
2.09	04	2.01	1. Kegiatan : Penyusunan Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Keluaran : Peta ketahanan dan kerentanan pangan (PSVA) Hasil : Informasi Kerentanan dan Ketahanan pangan	2 jenis 100 %	2 jenis 100 %	23.504.000	18.830.000	5.116.200				
2.09	04	2.01.0001	1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 dokumen	2 dokumen	21.962.100	18.830.700	5.116.500	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat	
2.09	04	2.02	2. Kegiatan : Peningkatan kewirausahaan pangan kewirausahaan pangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota Hasil : Informasi data pendukung penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (PSVA)	6 kali 100 %	5 kali 100 %	40.917.275	35.084.775	17.146.700				
2.09	04	2.02.0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	40.917.275	35.084.775	17.146.700	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat	
2.09	05	2.01	3. Program : Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	94,29 %	100 %	95.486.890	92.432.490	82.432.490				
2.09	05	2.01	1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Hasil : Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan	16 kali 94,29 %	16 kali 100 %	95.486.890	92.432.490	82.432.490				
2.09	05	2.01.0007	1. Pemediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 dokumen	95.486.890	92.432.490	82.432.490	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025			Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran
					Sebelum (4)	Sesudah (5)		Renja 2025 (6)	APBD 2025 (7)	Renja-P 2025 (8)	Lokasi (9)	Sumber Dana (10)	
(1)			(2)	(3)									(12)
3			Urusan : Pilihan										
3.27			Bidang Urusan : Pertanian										
3.27.01	2.01		1. Program : Program Penguatan Usaha Peternak di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan ketuntasan	100 %	100 %		24.813.597,643	18.554.524,431	18.113.018,254			
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %		17.653.157,623	16.087.339,082	15.385.813,621			
				3. Persentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	100 %	100 %							
				4. Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %							
				1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %		15.607.648,419	14.383.100,758	14.126.156,221			
3.27.01	2.01		1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen		4.649,819	4.649,819	2.008,800			
				Hasil : Terpejunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	100 %	100 %							
3.27.01	2.01.0001		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen		2.858,719	2.858,719	1.089,400	Tgandan	APBD-P	ASN
3.27.01	2.01.0007		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan		1.791,100	1.791,100	919,400	Tgandan	APBD-P	ASN
3.27.01	2.02		2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen		15.602.998,600	14.348.453,939	14.124.147,721			
				Hasil : Terpejunya dokumen keuangan sesuai peraturan	100 %	100 %							
3.27.01	2.02.0001		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	86 Orang/bulan		15.600.000,000	14.345.455,339	14.121.329,121	Tgandan	APBD-P	ASN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		
						Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi	Sumber Dana			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)		
3	27	01	2.02	0005	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	2.998.600	2.908.600	2.818.600	Tegapan	APBD-P	ASN	
					3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 %	75 %	154.950.000	75.000.000	51.080.000				
3	27	01	2.05	0009			Keluaran : Terperuhnya administrasi umum Perangkat Daerah	97 orang	94 orang	154.950.000	75.000.000	51.080.000			
					Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	75 %	75 %								
3	27	01	2.05	0002	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 paket	49.950.000	0	0				
3	27	01	2.05	0009		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	3 orang	105.000.000	75.000.000	51.080.000	Dalam dan Luar Daerah	APBD-P	ASN
					4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Administrasi Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	588.883.548	523.609.668	328.469.020				
3	27	01	2.06				Keluaran : Terperuhnya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	588.883.548	523.609.668	328.469.020			
					Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %								
3	27	01	2.06	0001	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	18.003.900	18.003.900	9.795.400	Tegapan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27	01	2.06	0002		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	75.069.108	78.390.228	50.676.620	Tegapan	APBD-P	Pegawai DKPP

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran		
						Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi			Sumber Dana
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	
3	27	01	2.06	0003	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	1 paket	24.387.440	24.387.440	10.697.800	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27	01	2.06	0004	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	238.057.500	227.872.500	146.083.000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27	01	2.06	0005	Keluaran : Jumlah Paket Peralang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	1 paket	1 paket	54.335.600	30.875.600	23.216.200	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27	01	2.06	0006	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	4.080.000	4.080.000	1.920.000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27	01	2.06	0009	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	175.000.000	140.000.000	84.080.000	Luar Daerah	APBD-P	Pegawai DKPP	
					4 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	1.301.675.655	1.135.625.656	880.103.080				
3	27	01	2.07	5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah	8 jenis	2 jenis	128.495.000	60.006.000	13.467.000				
					Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %							
3	27	01	2.07	0002	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 unit	68.490.000	0				
3	27	01	2.07	0005	2. Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	0 unit	11.202.000	11.202.000				
3	27	01	2.07	0006	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	2 unit	48.804.000	48.804.000	13.467.000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP
3	27	01	2.08	6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	573.291.056	573.291.056	517.283.880				
					Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %							
3	27	01	2.08	0001	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	3.632.000	3.632.000	2.344.000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran		
						Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi	Sumber Dana			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)		
3	27.01	2.08	0002	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disetujui	12 laporan	12 laporan	245,070,000	245,070,000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP		
3	27.01	2.08	0004		Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disetujui	1 laporan	12 laporan	324,589,056	324,589,056	323,939,880	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27.01	2.09		7 Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	13 jenis	13 jenis	599,888,600	502,328,600				
						Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %			349,357,200			
3	27.01	2.09	0001	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	21 unit	71,351,000	71,351,000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP	
3	27.01	2.09	0002			Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	127,506,000	99,946,000	53,074,000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP
3	27.01	2.09	0003			Keluaran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 unit	3 unit	131,196,200	131,196,200	75,760,000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP
3	27.01	2.09	0006			Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	42,050,400	42,050,400	25,165,200	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP
3	27.01	2.09	0009			Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	3 unit	3 unit	227,785,000	157,785,000	157,785,000	Tgandan	APBD-P	Pegawai DKPP
3	27.02			2 Program	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian		14.70 %	13.24 %	1,644,445,700	1,276,317,684	1,631,784,735			
3	27.02	2.01				1. Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keluaran	Jumlah sarana pertanian yang diberikan	12 jenis	6 jenis	686,468,100	337,372,084	500,276,935	
						Hasil	Persentase fasilitasi kebutuhan sarana pertanian	14.70 %	13.24 %						

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	
						Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi		
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
3	27.02	2.01.0001	Sub Kegiatan	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi	Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	686.468.100	337.372.084	500.276.935	Tgpaudai, Sijuk, Badau, Membalong	APBD-P, Insentif Fiskal	Masyarakat dan Kelompok Tani
3	27.02	2.02	2. Kegiatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Benih dan bibit pertanian Hasil : Persentase kontribusi penyediaan benih dan bibit pertanian	10.000 bibit 0.06 %	6000 bibit 0.036 %	543.500.600	527.468.600	472.654.800			
3	27.02	2.02.0003	Sub Kegiatan	1. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	543.500.600	527.468.600	472.654.800	Sijuk dan Badau	APBD-P	Masyarakat
3	27.02	2.03	3. Kegiatan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Bibit Ternak Hasil : Penambahan populasi ternak sapi yang berkualitas	84 ekor 25 ekor	84 ekor 20 ekor	137.466.000	137.466.000	142.266.000			
3	27.02	2.03.0001	Sub Kegiatan	1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 laporan	1 laporan	137.466.000	137.466.000	142.266.000	Badau	APBD-P	UPT Perikanan
3	27.02	2.06	4. Kegiatan	Pemediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keluaran : Bibit ternak Hasil : Penambahan populasi ternak unggas	1.500 ekor 1.500 ekor	9515 ekor 9515 ekor	277.011.000	274.011.000	516.587.000			
3	27.02	2.06.0003	Sub Kegiatan	1. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keluaran : Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.500 ekor	9500 ekor	237.916.000	234.916.000	479.227.000	Tgpandan, Sijuk, Badau, Membalong	APBD-P, Insentif Fiskal	Kelompok Tani
3	27.02	2.06.0004		2. Pengadaan Benih/Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Keluaran : Jumlah Benih/Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	110 dosis	60 dosis	39.095.000	39.095.000	37.360.000	Kab Belitang	APBD-P	Peternak

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	
					Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi	Sumber Dana		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	
3	27	03	3. Program : Program Penyelidikan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					4.739.371.894	529.119.494	429.049.385			
				1. Persentase prasarana yang digunakan	24,62 %	24,62 %							
				2. Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	80 %	80 %							
3	27	03						965.296.000	459.534.600	386.574.600			
			1. Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Persentase prasarana yang digunakan	24,62 %	24,62 %		965.296.000	459.534.600	386.574.600			
				Keluaran : Prasarana pertanian yang digunakan	136 unit	125 unit							
				Hasil : Persentase prasarana pertanian yang digunakan	24,62 %	24,62 %							
3	27	03	Sub Kegiatan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 dokumen	1 dokumen		750.000.000	299.978.600	299.978.600	Sijuk dan Membalong	DBH Sawit Rakyat	
			2. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang Dikelola	Selamatan	1 dokumen	1 dokumen		172.300.000	118.760.000	54.600.000	Tgpendan, Sijuk, Badau, Membalong	APBD-P	Kelompok Tani
3	27	03	3. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Keluaran : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	1 dokumen		42.996.000	40.796.000	31.996.000	Tgpendan, Sijuk, Badau, Membalong	APBD-P	Kelompok Tar
				2. Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	80 %	80 %		3.764.077.894	69.584.894	42.474.785			
3	27	03	2. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Keluaran : Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara	6 unit	2 unit		3.764.077.894	69.584.894	42.474.785			
				Hasil : Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	80 %	80 %							
3	27	03	Sub Kegiatan	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2 unit	0 unit		100.000.000	0	0			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran
						Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi	Sumber Dana	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
3	27	03	2.02	0003	Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	0 unit	500.000.000	0	0	0		
3	27	03	2.02	0004	Keluaran : Jumlah DAM Panti yang Dibangun, Direhabilitasi	5 unit	0 unit	720.000.000	0	0	0		
3	27	03	2.02	0006	Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	0 unit	30.000.000	0	0	0		
3	27	03	2.02	0008	Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh dan Kecamatan serta Sarana pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 unit	999.718.000	0	0	0		
3	27	03	2.02	0009	Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 unit	0 unit	1.050.000.000	0	0	0		
3	27	03	2.02	0010	Keluaran : Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	0 unit	220.000.000	0	0	0		
3	27	03	2.02	0015	Keluaran : Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	0 unit	84.359.894	69.584.894	42.474.785	Tanjungpandan	APBD-P	Peternak
3	27	04			4 Program : Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	100 %	272.628.426	213.162.141	160.865.801			
3	27	04	2.01		1 Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 jumlah layanan 90 %	4 jumlah layanan 90 %	98.164.800	73.748.640	50.976.000			
3	27	04	2.01	0008	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	4 laporan	98.164.800	73.748.640	50.976.000	Kab Belitung	APBD-P	Masyarakat Veteriner
3	27	04	2.03		2 Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	100 %	1200 pasien	110.479.126	91.729.001	86.721.001			

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025		Capaian Kerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	
						Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja-P 2025	Lokasi	Sumber Dana		
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	
					Hasil : Persentase (%) fasilitasi pelayanan jasa medik veteriner	100 %	100 %							
3	27.04	2.03.0002	Sub Kegiatan	1. Peningkatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 laporan	110.479.126	91.729.001	86.721.001	Tgpendan	APBD P	Masyarakat Veteriner		
3	27.04	2.04	3 Kegiatan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Keluaran Kesejahteraan Hewan	Keluaran : SDM Juru Sembelih Halal (Juleha) yang kompeten	30 orang	63.984.500	47.684.500	23.168.800					
					Hasil : Persentase penerapan penyembelihan sesuai syarat	89.15 %								
3	27.04	2.04.0008	Sub Kegiatan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pemenuhan dan Kesejahteraan Hewan	Keluaran : Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	30 orang	63.984.500	47.684.500	23.168.800	Tgpendan	APBD-P	Pengurus masjid/mushola		
3	27.05		5 Program	Pengendalian dan Penguatanganan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100 %	155.000.000	132.284.030	85.686.382					
3	27.05	2.01	1. Kegiatan	Pengendalian dan Penguatanganan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Keluaran : Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	7 poktan	155.000.000	132.284.030	85.686.382					
					Persentase penanggulangan bencana pertanian	100 %								
3	27.05	2.01.0001	Sub Kegiatan	Pengendalian Organisasi Pergerakan Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Keluaran : Jumlah Unit Serangan Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	488 ha	155.000.000	132.284.030	85.686.382	Kab Belitung	APBD-P	Kelompok Tani		
3	27.06		6 Program	Program Pertanian Usaha Pertanian	Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	55.400.000	55.400.000	37.754.000					
3	27.06	2.01	1. Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten	Keluaran : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	17 usaha pertanian	55.400.000	55.400.000	37.754.000					
					Hasil : Persentase (%) usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %								

BAB IV

PENUTUP

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menerapkan mekanisme perencanaan *bottom up planning* dan *top down policy*. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Perubahan Rencana Kerja (Ranhir Renja-P) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Kecamatan yang disinkronkan atau diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan Kementerian Pertanian. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa target indikator sasaran yang belum tercapai, oleh karena itu diharapkan untuk tahun-tahun ke depan perlu perhatian yang serius dari seluruh stakeholder terkait untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Belitung.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan pembangunan di Kabupaten Belitung tahun 2025 semester II sehingga arah, tujuan, sasaran serta strategi dalam mencapai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Belitung dapat berjalan dengan baik dan terencana.

Tanjungpandan, Agustus 2025

Kepala Dinas,



Ir. Destika Efenly, MM

Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19651208 199203 1 005